

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Berdasarkan (undang undang no 44, 2009) tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pada era globalisasi ini manajemen moderndari unit pemerintah dituntut untuk lebih profesional, akuntabel, dan transparan, termasuk kinerja pelayanan non keuangan maupun keuangan pada Rumah sakit, mengingat Rumah sakit sebagai instansi pemerintah dalam hal ini merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat, pelayananan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satunya adalah pelayanan dalam bidang kesehatan maka pemerintah membangun sarana prasarana pendukung antara lain rumah sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu lembaga pelayanan publik dalam bidang kesehatan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat serta untuk peningkatan kualitas pelayananan secara terus menerus dan berkesinambungan (Amintasih, 2010)

Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dan juga dituntut memenuhi biaya rumah sakit itu

sendiri sehingga sering dihadapkan pada suatu dilema yaitu di satu pihak harus menghadapi biaya-biaya yang terus meningkat dan dipihak menghadapi ketidakmampuan masyarakat membayar jasa pelayanan kesehatan yang semakin mahal. Sehingga, bila rumah sakit tetap terus melaksanakan fungsi sosialnya maka rumah sakit akan dihadapkan pada masalah kesulitan arus kas (*cash flow*) namun apabila rumah sakit mengabaikan fungsi sosial dan hanya melayani masyarakat yang dapat membayar saja sehingga berubah menjadi *for profit hospital*, Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan otonomi rumah sakit pemerintah, dengan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi rumah sakit untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya, agar lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Dalam rangka upaya tersebut perlu dilakukan penataan kembali manajemen rumah sakit, termasuk pola pengelolaan keuangannya, maka rumah sakit perlu diberikan status BLU/BLUD. Diharapkan dengan status tersebut kondisi keuangan rumah sakit lebih sehat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik serta mutu pelayanan kesehatan meningkat.

Berdasarkan (Permendagri No 61, 2007) menyatakan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan beberapa kasus mengenai kinerja rumah sakit yang telah berstatus BLU/BLUD tidak menunjukkan kenaikan kinerja secara signifikan baik dari segi keuangan maupun non keuangan, sehingga pradigma negatif masyarakat mengenai satuan kerja pemerintah hanya mengutamakan daya serap dibanding dengan kinerja dilapangan terus berkelanjutan.

(Kartika, 2015) dalam penelitian yang berjudul Analisis kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Haryoto Lumajang Sebelum dan Sesudah Implementasi Badan Layanan Umum, hasilnya aspek *likuiditas* dan *solvabilitas* mengalami kenaikan, sedangkan rentabilitas, *cost recovery rate* dan tingkat kemandirian mengalami penurunan sesudah berstatus BLUD.

(Susandi et al., 2017) dalam penelitian yang berjudul kinerja keuangan dan efisiensi proses internal sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD , Pada RSUD Kabupaten Klungkung hasilnya tidak terdapat perbedaan kinerja keungan pada seluruh variabel yang diteliti serta tidak terdapat perbedaan kinerja efisiensi proses internal pada seluruh variabel yang diteliti.

(Chrishartoyo et al., 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah Terdapat perbedaan *mean* yang

signifikan terhadap kinerja keuangan RSUD Dr. Mowardi sebelum dan sesudah melakukan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perbedaan tersebut memperlihatkan arah perubahan yang positif dikarenakan manajemen RSUD Dr. Moewardi lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangannya. Sementara terhadap kinerja efisiensi pelayanan Dr. Moewardi sebelum dan sesudah melakukan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tidak Terdapat perbedaan *mean yang signifikan*. Meskipun uji hipotesis mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja efisiensi pelayanannya, rasio-rasio tersebut masih bergerak dalam standar efektif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menurut Dimiyati & Mudjiono (2006, hal. 19), pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu tindakan yang penting dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja Rumah Sakit sebelum dan sesudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD mengalami peningkatan kinerja atukah malah tidak mengalami perubahan peningkatan kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan yang signifikan.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai kinerja keuangan dan pelayanan rumah sakit sebelum dan sesudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan pendekatan *literatur review*. Menurut Hasibuan (2007) Literatur review berisi uraian tentang

teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah.

## **1.2 Rumusan masalah**

Bagaimana kinerja keuangan dan non keuangan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengevaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah menerapkan PPK-BLUD dengan Pendekatan *Literatur Review*

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengevaluasi Kinerja Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Menerapkan PPK-BLUD
2. Mengevaluasi Kinerja Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Menerapkan PPK-BLUD

## **2.4 Manfaat**

### **2.4.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir, skripsi sebagaimana memperoleh gelar sarjana pada program

studi Administrasi Rumah Sakit di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo.

#### **2.4.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit**

Memperoleh Informasi mengenai apakah ada perbedaan kinerja keuangan dan non keuangan Rumah Sakit sebelum dan sesudah menerapkan PPK-BLUD

#### **2.4.3 Manfaat Bagi Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo**

Sebagai bahan referensi pembelajaran serta meningkatkan wawasan, pengetahuan, *hardskill*, dan *softskill* mahasiswa sehingga dapat menghasilkan lulusan mahasiswa yang berkompeten di bidang kesehatan.